Turnitin 25. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

by CEK TURNITIN

Submission date: 08-Jun-2024 02:02AM (UTC+0400)
Submission ID: 2397876590
File name: ayaan_Masyarakat_Pesisir_di_Kecamatan_Bontoa_Kabupaten_Maros.pdf (164.84K)
Word count: 3212
Character count: 21899



Phinisi Integration Review
Vol. 7, No.1, Februari 2024 Hal 066 - 072
Website: http://ojs.unm.ac.id/pir
p-ISSN: 2614-2325 dan e-ISSN: 2614-2317

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS

Adi Sumandiyar[1], Hasruddin Nur[2], Abdul Muin[3]

[123]Universitas Sawerigading Makassar

[123]Email: adisumandiyar@gmail.com, asrul23.23.a2@gmail.com, abdulmuin.unsamks@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros**.** Hasil penelitian menunjukkan agar strategi potensi masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah dengan cara membuat instrument yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan wilayah pesisir guna mengoptimalkan kualitas lingkungan pesisir melingkupi aspek sosial, ekonomi dan budaya serta mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat dalam rangka memberikan akses dalam hal berbagai kepentingan masyarakat nelayan agar terlibat dalam pembangunan di wilayah pesisir.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Pesisir.

Abstract

This research aims to optimize the success of empowering coastal communities in Bontoa District, Maros Regency. The results of the research show that the potential strategy for fishing communities in the coastal areas of Bontoa District, Maros Regency is to create instruments that regulate the empowerment of fishing communities in coastal areas in order to optimize the quality of the coastal environment covering social, economic and cultural aspects and be able to create a conducive atmosphere for the implementation of community development in in order to provide access to various interests of fishing communities to be involved in development in coastal areas.

Keywords: Community Empowerment and Coastal Communities.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintah berperan dalam hal sebagai regulator tentunya untuk memberikan acuan kepada masyarakat wilayah pesisir untuk dijadikan instrument guna mengatur segala bentuk kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Kecamatan Bontoa memiliki tugas dan wewenang untuk memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik di wilayah darat, laut/ pantai, maupun di tempat masyarakat yang dianggap melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya lainnya.

Pemerintah berperansebagai dinamisator yang diharapkan mampu menggerakkan keterlibatan masyarakat bilamana terdapat kendala dan hambatan dalam proses pembangunan guna membantu serta memelihara dinamika pembangunan daerah melalui pemberian bimbingan, pengarahan secara efektif dan berkala kepada masyarakat. Namun demikian, hal ini belum sepenuhnya memberikan dampak positif karena masih belum optimalnya penyuluhan dan pelatihan yang diperoleh masyarakat nelayan.

Pemerintah juga memiliki peran sebagai fasilitator yang diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka memberikan akses berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan. Namun demikian, bantuan permodalan dan penyediaan alat tangkap nelayan belum terlasurkan dengan optimal, sehingga mengakibatkan masih banyak nelayan yang kekurangan peralatan alat tangkap ikan.

Salah satu aspek pemberdayaan adalah suatu proses sekaligus hasil dari proses tersebut (Tampubolon, 2012). Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai salah satu konsep yang didalamnya meningkatkan kualitas, meliputi sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian (Abidin, Z., AS, 2017). Pemberdayaan juga merupakan bagian dari paradigmapembangunan yang fokusnya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya, mulai dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM)/ intelektual, material dan fisik, sampai pada aspek manajerial (Sutarto, 2018). Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan dikarenakan kondisi internal maupun kondisi eksternal (Suharto, 2017). Pemberdayaan masyarakat di Indonesia telah menjadi program Nasional pemerintah dan sawasta (Ma'rif, 2016). Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan (Rahim, dkk., 2014).

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat tidak hanya membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) melainkan memiliki pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan dimana masyarakat dijadikan sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, melainkan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri (Theresia, 2015). Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran (Desmiyawati, dkk, 2015). Pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain masih belum sejahtera (Nuryanto & Haryono, 2017).

Terdapatnya pembangunan infrastuktur dan pertumbuhan ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang menetap di wilayah perkotaan dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir (*hinterland*), sehingga cenderung terjadi kesenjangan antara penduduk di daerah perkotaan dengan penduduk di daerah pesisir (Qodriyatun, 2013). Masyarakat pesisir dimaksudkan adalah masyarakat yang menetap di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya (Rahmanto, 2015). Masyarakat yang menetap di wilayah pesisir pantai Indonesia dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang (Nugroho, 2015). Ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut (Witarsa, 2015). Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, memiliki tujuan untuk mendidik agar nelayan lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk hidup lebih baik dalam memanfaatkan dan mengakses sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan (Zamzami, 2011). Besarnya potensi kelautan tersebut ternyata tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini terlihat melalui kondisi sosial ekonomi nelayan yang masih jauh berbeda dengan potensi sumberdaya alamnya (Razali, I, 2004). Selanjutnya untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat hendaknya membangun konstruksi dasar penciptaan kohesi sosial bertujuan untuk mencegah konflik sosial yang diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan sosial utamanya bagi masyarakat lokal (Sumandiyar, A. 2023).

Dengan menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indept* interview) yang penulis lakukan terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir, maka

diketahui belum optimalnya pemberdayaan nelayan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemenuhan kebutuhan, sehingga mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perhatian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan model pendekatan multisistemik yang digunakan untuk memberikan gambaran umum perihal lokasi penelitian (Cottrell et al. 2018). Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh perihal gagasan utama penulis tentang subjek dalam bentuk wacana dan konteks ke khususan (Tramonti, Bonfiglio, dkk., 2019). Adapun metode pengumpulan data melalui cara telaah dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi (Decker et al., 2018). Equatora & Rahayu (2019), memaknai proses ini sebagai prosedur yang sistematis dan standar dalam mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi.

Menurut Bell & Willmott (2016), ada korelasi antara pengumpulan data, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi dengan pertanyaan penelitian yang belum terpecahkan. Karena itu, metode deskriptif kualitatif dirumuskan untuk memberikan jawaban atas permasalahan (London et al., 2016). Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan model triangulasi dan interaksi bertujuan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian (Gellatly et al., 2019). Model tersebut berguna dalam memeriksa keabsahan data, sehingga dapat memberikan perbandingan diantara hasil dokumentasi dengan wawancara. Dengan demikian, maka prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi hasil observasi dan wawancara dengan wawancara dengan cara, yaitu: (1) menyusun berbagai bentuk isntrumen pertanyaan, (2) mengecek kembali sumber data, (3) memanfaatkan metode yang memungkinkan pemeriksaan data yang valid (Weisz et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis merumuskan permasalahan dan solusi yang akan diberikan perihal pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Hasil penelitian tersebut terdapat tiga segmentasi permasalahan pokok yang dihadapi oleh nelayan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Isu sentralnya adalah Belum ada instrumen yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan wilayah pesisir. Pada solusinya kita Membuat instrument yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan wilayah pesisir guna mampu mengoptimalkan kualitas lingkungan pesisir melingkupi dimensi sosial, ekonomi dan budaya.
2. Isu sentralnya adalah Belum optimalnya penyuluhan dan pelatihan yang diperoleh masyarakat nelayan. Sedangkan solusinya adalah kita Membuat kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan wilayah pesisir yang luarannya mampu menggerakkan partisipasi masyarakat yang menemukan kendala dan hambatan dalam proses pembangunan guna mendorong serta memelihara dinamika pembangunan daerah melalui pemberian bimbingan, pengarahan secara efektif dan berkala kepada masyarakat.
3. Isu sentralnya adalah Terbatasnya akses bantuan permodalan dan penyediaan alat tangkap nelayan yang dinilai belum terdistribusi secara optimal, sehingga mengakibatkan masih terdapatnya nelayan yang kekurangan peralatan alat tangkap ikan. Sedangkan untuk solusinya adalah Menyediakan fasilitas akses bantuan permodalan dan penyediaan alat tangkap nelayan agar pendistribusian peralatan alat tangkap ikan dapat diakses secara optimal bagi masyarakat nelayan dan diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka memberikan akses berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan.

1. Strategi Pemberdayaan Nelayan Aspek Regulator

Pemerintah berperan sebagai regulator bertujuan untuk menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggara pembangunan. Selain itu juga sebagai landasan dasar yang akan dijadikan sebagai instrument oleh masyarakat mengukur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat utamanya masyarakat nelayan. Pemberdayaan nelayan mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Hasil wawancara dengan informan pertama berinisial RA, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Untuk saat ini tidak ada peraturan daerah (perda) yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan. Kami hanya mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan kedua berinisial AY, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Yang menjadi acuan selaku penanggungjawab terhadap pemberdayaan nelayan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Ini adalah peraturan yang baru dikeluarkan setahun lalu untuk menyempurnakan aturan yang sebelumnya" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan ketiga berinisial HY, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Kami telah melakukan usaha untuk memberdayakan masyarakat nelayan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Pasal 3 yang intinya dari pasal tersebut adalah untuk mengembangkan usaha dan mengangkat kepentingan usaha nelayan" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan keempat berinisial WW, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Dalam melakukan pemberdayaan pemerintah selalu menginginkan agar instrumen pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk meningkatkan kempauan nelayan dalam melaksanakan kegiatannya yang lebih baik" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Pemerintah sebagai regulator telah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelengaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistim yang mengorganisir diri mereka sendiri. pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

2. Strategi Pemberdayaan Nelayan Aspek Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator salah satunya memiliki fungsi untuk menggerakkan partisipasi multipihak skala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan yaitu untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu yang dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan. Hal ini bertujuan agar menjadikan masyarakat nelayan sebagai aktor utama dalam pemberdayaan guna untuk meningkatkan usaha dan penghasilan nelayan.

Hasil wawancara dengan informan pertama berinisial RA, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Fungsi pemberdayaan melalui penguatan kapasitas nelayan menjadi hal penting dan utama bagi Dinas kelautan dan perikanan, hal ini dilakukan agar masyarakat nelayan dapat meningkatkan mutu dan kapasitasnya sehingga investasi apapun oleh pemerintah mampu diserap dan digerakkan oleh masyarakat sehingga dapat menjadi stimulan untuk kegiatan perekonomian daerah" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan kedua berinisial AY, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Adapun kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat nelayan yang akan dilakukan diantaranya adalah program

sertifikasi nelayan yang bertujuan untuk mengangkat profesi nelayan sebagai pekerja yang diakui secara nasional maupun internasional, program ini langsung diberikan oleh BPSDMP KP kepada setiap DKP setempat untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat nelayan". (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan ketiga berinisial HY, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"kami dinas DKP selalu melakukan pembimbingan penyuluhan kepada kelompok nelayan, berupa BIMTEK PKP(bimbingan teknis Pusat Kreatif Produktif) dengan pemberian bimbingan kepada setiap anggota kelompok mengenai pembudidayaan ikan dan lainnya". (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan keempat berinisial YY, selaku Ketua Kelompok Nelayan:
"kami sebagai nelayan mendapatkan bimbingan dari penyuluh, selain itu kami juga didampingi dan dibimbing perihal tata cara membudidayakan ikan dan masyarakat nelayan merasa pemerintah telah melakukan perannya, namun bimbingan ini terkadang tidak efektif karena hanya di hadiri oleh bebrapa nelayan saja, sehingga resikonya hanya sebagian saja yang paham tentang sosialisasi dan pelatihan". Hasil wawancara, 07 November 2023).

Dinas Kelautan dan Perikanan telah menjalankan perannya dalam rangka melakukan bimbingan kepada nelayan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dengan melakukan BIMTEK dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan meski belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena kurangnya sosialasisai yang dilakukan namun masyarakat sangat merasakan manfaat yang diperoleh dengan adanya bimbingan yang dilakukan masyarakat mengalami kemajuan dalam pembudidayaan ikan dan lainnya.

3. Strategi Pemberdayaan Nelayan Aspek Fasilitator

Aspek fasilitator merupakan petugas yang berperan membantu kelompok nelayan yang bertujuan untuk membantu membuat rencana dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan dalam Masyarakat Nelayan. Fasilitator memiliki tujuan dan fungsi untuk memudahkan Masyarakat Nelayan dalam rangka memudahkan mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan yang ada dalam lingkungan Masyarakat Nelayan.

Hasil wawancara dengan informan pertama berinisial RA, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"Dalam rangka pemberdayaan bagi nelayan kami selalu memberikan usaha yang terbaik agar para nelayan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengelolah hasil perikanan dan tentunya kami menyesuaikan dengan kompetensi dan kelahian yang dimiliki para nelayan pelatihan ini berguna sebagai penunjang sekaligus sebagai pemberdayaan agar cara pengelolaan, dan penanganan ikan secara tepat baik itu pra maupun pasca penangkapan selain itu kami juga memfasilitasi mereka dengan memberikan bantuan berupa jaring, kapal dan alat tangkap ikan lainnya yang mereka butuhkan" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan kedua kedua berinisial AY, selaku pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan:
"kami memberikan bimbingan dan pelatihan kurang lebih 3-4 kali pertahun dan tahun ini kegiatan bimbingan dan pelatihan ini dihadiri oleh masyarakat nelatan dipesisir pantai desa Tamasaju dan masyarakat sangan respon dengan pelatihan ini" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Hasil wawancara dengan informan ketiga berinisial YY, selaku Ketua Kelompok Nelayan:
"kami mendapatkan pelatihan dan bimbingan bagiman acara mengelolah hasil perikanan dan bagaimana memanfaatkan hasil perikanan dan juga meningkatkan pendapatan hasil perikanan, masyarakat merasa senang dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah" (Hasil wawancara, 07 November 2023).

Penyuluhan sudah diupayakan oleh pemerintah daerah tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif karena penyuluhan dilakukan hanya pada saat ada kegiatan atau urusan yang mendesak artinya penyuluh turun kelapangan jika masyarakat yang meminta untuk didampingi dan tidak ada penjadwalan rutin.

Persoalan kesesuain waktu antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Seharusnya persoalan tersebut dapat diatasi oleh pemerintah daerah agar tujuan dari program pemerintah yakni meningkatkan pendapatan nelayan sehingga pemberdayaan bagi nelayan dapat dirasakan oleh nelayan itu sendiri.

KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah dengan cara membuat instrument yang mengatur pemberdayaan masyarakat nelayan wilayah pesisir agar dapat mengoptimalkan kualitas lingkungan pesisir melingkupi aspek sosial, ekonomi dan budaya serta mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka memberikan akses berbagai kepentingan masyarakat nelayan untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah pesisir.

DAFTAR RUJUKAN

Abidin, Z., AS. (2017), Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Jurnal Caraka Prabu, 1 (2), 84-122.

Bell, E., & Willmott, H. (2016). Qualitative Research in Business and Management. In Qualitative Research in Business and Management.

Cottrell, D. J., Wright-Hughes, A., Collinson, M., Boston, P., Eisler, I., Fortune, S., Graham, E. H., Green,J., House, A. O., Kerfoot, M., Owens, D. W., Saloniki, E. C., Simic, M., Lambert, F., Rothwell, J., Tubeuf,S., & Farrin, A. J. (2018). Effectiveness of systemic family therapy versus treatment as usual for young people after self-harm: a pragmatic, phase 3, multicentre, randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry.

Decker, M. R., Wilcox, H. C., Holliday, C. N., & Webster, D. W. (2018). An Integrated Public HealthApproach to Interpersonal Violence and Suicide Prevention and Response. Public Health Reports, 133(1_suppl), 65S-79S.

Desmiyawati, Hasan, H., Samsir, & Azlina, N. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta Dan Corporate Social Responsibility. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 89-95.

Equatora, M. A., & Rahayu, M. (2019). Media in Community Guidance Services. Proceedings of the 2nd International Conference on Educational Sciences (ICES 2018). https://doi.org/10.2991/ices-18.2019.52.

Gellatly, R., Brookman-Frazee, L., Barnett, M., Gonzalez, J. C., Kim, J. J., & Lau, A. S. (2019). Therapist Reports of EBP Client Engagement Challenges in Sessions with Diverse Youth and Families in Community Mental Health Settings. Child & Youth Care Forum, 48(1), 55–75.

London, S., Maudsley, N., Standard, M. N.-N., 2014, U., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C.A. C., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska, C. A. C., Gunn, A. C. A. A. C. (Alexandra C., Hruska,C. A. C., D'Arbon, T., Duignan, P., Disorders, D. L. G.-A. of eating, 2005, U., Higgins, J., Mainstone, F.,Work, J. P.-A. N. Z. S., 2015, U., Muir, R. C., ..Malden, P. E. (2016). Managing childhood obesity: Learnings from the implementation of two statewide programmes. Wiley Online Library.

Ma'arif, R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Majakerta Village, Indramayu, Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 17-24.

Nugroho, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di Wilayah Pesisir Pantai. Jurnal Teknologi Pangan, 19-26.

Nuryanto, & Haryono. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah melalui Koperasi Nelayan dan E-commerce. Jurnal Saintek Maritim, 49-63.

Qodriyatun, S. (2013). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di

Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat. 91- 100.

Rahim, M., Tahir, M., & Rumbia, W. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Journal The WINNERS, 23-33.

Rahmanto, D. (2015). Permberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan. Jurnal Hukum.

Razali, I. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 61-68.

Suharto, E. (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung PT. Refika Aditama.

Sumandiyar, A. (2023). Capitalization and Social Transformation in the Grand Mall Maros, Indonesia. *International Journal of Qualitative Research*, 2 (1), 77-81.

Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Perspektif Gender. Jurnal Trias Politika, 131-148.

Tampubolon, D. (2012). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Sorot, 1-190.

Theresia, A. (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Tramonti, F., Bonfiglio, L., Bongioanni, P., Belviso, C., Fanciullacci, C., Rossi, B., Chisari, C., & Carboncini, M. C. (2019). Caregiver burden and family functioning in different neurological diseases. Psychology, Health and Medicine.

Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Vaughn-Coaxum, R. A., Ugueto, A. M., Eckshtain, D., & Corteselli,K. A. (2019). Are Psychotherapies for Young People Growing Stronger? Tracking Trends Over Time forYouth Anxiety, Depression, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Conduct Problems. Perspectiveson Psychological Science, 14(2), 216–237.

Witarsa. (2015). Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Pontianak. Jurnal Economia, 26-46.

Zamzami, L. (2011). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat. 113-121.

Turnitin 25. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

ORIGINALITY REPORT

13%	%	%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to unars Student Paper	13%

Exclude quotes	Off
Exclude bibliography	On